

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara yang disurvei (*Transparency International*, 2018) Pengertian Kecurangan laporan keuangan sendiri didefinisikan oleh *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) sebagai hal yang disengaja, salah saji atau penghilangan fakta-fakta material, atau data akuntansi yang menyesatkan dan, bila dianggap dengan semua informasi yang telah dibuat akan menyebabkan pembaca mengubah penilaian atau keputusannya.

Berikut Kecurangan sering terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Menurut survei Transparansi Internasional, Indonesia menduduki peringkat ke 89 dari 180 adalah tabel yang menunjukkan data *fraud* yang paling sering terjadi di Indonesia.

Tabel 1.1

Data *fraud* yang paling sering ditemukan di Indonesia

No.	Jenis <i>Fraud</i>	Jumlah Kasus	Persentase
1	Korupsi (<i>corruption</i>)	154	67%
2	Penyalahgunaan Aktiva / Kekayaan Organisasi (<i>asset missappropriation</i>)	71	31%
3	Kecurangan Laporan Keuangan (<i>Financial Statement Fraud</i>)	4	2%

Sumber: AFCE 2016

Pada tahun 2018, masyarakat dikejutkan dengan kasus manipulasi laporan keuangan dilakukan perusahaan multi pembiayaan PT. Sunprima Nusantara

Pembiayaan (SNP), anak usaha Columbia Group, perusahaan pembiayaan perabot rumah tangga dan retail. Manipulasi laporan keuangan SNP ini juga melibatkan dua Akuntan Publik (AP) yaitu Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsyul dan satu Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing Eny dan Rekan. Untuk nama terakhir, KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan, merupakan partner lokal dari KAP internasional Deloitte yang termasuk firma empat besar global.

Atas kesalahan audit laporan keuangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi kepada para akuntan publik tersebut karena dianggap melakukan kesalahan dalam audit laporan keuangan. Sanksi tersebut berupa pencabutan atau pembatalan izin operasi atau audit di sektor jasa keuangan seperti perbankan, multi pembiayaan, asuransi dan industri jasa keuangan lainnya.

Pengenaan sanksi terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik oleh Otoritas Jasa Keuangan mengingat laporan keuangan tahunan yang telah diaudit tersebut digunakan PT. SNP untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) yang berpotensi mengalami gagal bayar dan/atau menjadi kredit bermasalah. Sehingga langkah tegas Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Industri Jasa Keuangan (www.idx.co.id).

Namun sebenarnya, telah diambil langkah-langkah untuk menekankan tingkat kecurangan pelaporan keuangan. Sebelumnya *Blue Ribbon Company* (BRC) menyarankan sebaiknya perusahaan publik memiliki komite audit independen dan setidaknya terdapat satu orang yang menjadi ahli keuangan dalam

komite tersebut (Anisa, 2012). Pada akhirnya ketika karakteristik-karakteristik komite audit sudah terpenuhi, maka tugas dan fungsi komite audit diharapkan akan berjalan secara efektif, dimana salah satu tugas komite audit adalah pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan secara otomatis juga akan mengawasi kecurangan yang terjadi dalam pelaporan keuangan (Prasetyo, 2014).

Prasetyo (2014) dan Handoko (2017) telah melakukan penelitian yang dimana hasilnya mengungkapkan ketika semakin banyak anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan dan akuntansi maka akan semakin efektif dalam mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan sehingga keahlian keuangan komite audit yang diukur dengan pengungkapan kecurangan laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Faktor lain yang mempengaruhi kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan adalah kepemilikan manajerial. Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan manajerial mampu mensejajarkan insentif yang dimiliki oleh manajemen dan pemegang saham. Terdapat beberapa penelitian Daljono (2013) Hasil penelitian terhadap variabel kepemilikan manajerial yang diproksikan dengan ada tidaknya kepemilikan saham oleh orang dalam menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh faktor kepemilikan manajerial terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian oleh Prasetyo (2016) memberikan bukti berpengaruh negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Faktor selanjutnya yang memungkinkan dapat terjadinya kecurangan yaitu ukuran perusahaan, Menurut Setiawati dan Baningrum (2018) ukuran perusahaan

merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan sebagai ukuran ketidakpastian terhadap keadaan perusahaan dimasa depan. Besar kecilnya perusahaan juga dinilai dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan dari sebuah laporan keuangan. Terdapat dua pandangan mengenai ukuran perusahaan terhadap kecurangan dari sebuah laporan keuangan. Pertama, ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktek manajemen laba dalam hal ini yaitu tindakan kecurangan laporan keuangan, daripada perusahaan besar. Hal ini dikarenakan perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat (Annisya et al, 2016).

Penelitian oleh Prasetyo (2014) menemukan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian dari Kamarudin dan Wan (2014), Fimanaya (2014) menemukan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan berpengaruh tidak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Faktor lain yang dapat terjadinya kecurangan yaitu *leverage*, *leverage* sendiri dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Pengguna aset (aktiva) atau

dana tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi pemegang saham. Untuk itu *leverage* dapat diartikan sebagai penggunaan aktiva atau dana dimana untuk menggunakan dana tersebut perusahaan harus menutupi biaya tetap atau beban tetap. *Leverage* merupakan sumber dana eksternal karena *leverage* mewakili utang yang dimiliki perusahaan (Setiawati, 2018).

Penelitian tentang *leverage* perusahaan terhadap kecurangan pelaporan keuangan oleh Setiawati (2018) menemukan bahwa semakin meningkat rasio *leverage* perusahaan maka akan semakin meningkat juga kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Pada akhirnya, Prasetyo (2016) menemukan bahwa perusahaan berukuran besar dan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi berusaha untuk memanipulasi labanya pada periode saat ini.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, keahlian keuangan komite audit, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap kecurangan laporan keuangan adalah, Keahlian keuangan yang dibutuhkan agar komite audit memiliki pengetahuan mengenai konsep-konsep akuntansi sehingga komite audit tersebut dapat meningkatkan pemahamannya mengenai proses pelaporan, mengidentifikasi masalah terkait proses audit kepada manajemen dan auditor eksternal sehingga dibutuhkan pengetahuan atau ilmu mengenai keuangan dalam Islam dapat disebut dengan '*Alima* atau ilmu yang diperlukan agar dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan seperti yang telah diajarkan. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berbagi kepada orang lain. Kepemilikan manajerial membuat manajemen mempunyai peran ganda sebagai pemilik dan

pengelola, Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi dan memperbolehkan untuk menggunakan dan mengelola harta pribadinya tersebut dengan berbagai usaha sesuai dengan syariat. *leverage* dikategorikan sebagai utang (*qardh*), dimana dalam Islam diperbolehkan dalam berutang karena memberikan pinjaman (utang) merupakan tolong menolong dalam Islam. Secara keseluruhan, keahlian keuangan komite audit, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap kecurangan laporan keuangan belum memenuhi syariat Islam secara menyeluruh dalam setiap variabel yang mendukung sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan mengambil judul **“PENGARUH KEAHLIAN KEUANGAN KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, UKURAN PERUSAHAAN DAN *LEVERAGE* TERHADAP TERJADINYA KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN DAN TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM”**.

1.1 Rumusan Masalah

1. Apakah Keahlian Keuangan Komite Audit berpengaruh terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan?

4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan?
5. Apakah Keahlian Keuangan Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* secara simultan berpengaruh terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan?
6. Bagaimana pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan dari sudut pandang Islam?

1.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan.
5. Untuk mengetahui pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* secara simultan berpengaruh terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan.

6. Untuk mengetahui pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.3 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan pandangan dan wawasan mengenai kecurangan pelaporan keuangan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian dilakukan sebagai bahan referensi dan sumber informasi yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai kecurangan pelaporan keuangan.

3. Bagi Pihak Perusahaan

Penelitian ini juga diharapkan mampu untuk memberikan tambahan informasi bagi perusahaan mengenai masalah kecurangan pelaporan keuangan yang sering terjadi didalam perusahaan.